

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara maju dan berkembang tidak terlepas dari adanya permasalahan. Permasalahan umum yang terjadi di setiap negara maju dan berkembang adalah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan menjadi faktor utama kegagalan negara dalam mengayomi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Di negara berkembang salah satunya negara Indonesia juga memiliki kasus kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan investigasi terhadap kasus-kasus kemiskinan di Indonesia dan menganalisis latar belakang merebaknya kemiskinan. Kemiskinan Indonesia dikaitkan dengan aspek lain yang terkait dengan kesenjangan sosial, budaya, ekonomi dan sosial. Bakat yang tidak memadai juga dapat menyebabkan kemiskinan. Selain itu, kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan finansialnya. Penyebab kemiskinan bukan hanya keadaan fisik dan ekonomi, tetapi juga kegagalan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan setiap individu dalam kehidupannya. Kemiskinan di Indonesia terjadi dari tahun ke tahun dan tidak pernah berhenti. Dalam kasus kemiskinan Indonesia, Indonesia belum bisa maju seperti negara lain.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis dan mencatat setiap tahun bahwa penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Berikut informasi yang dikutip dari Badan Pusat Statistik terkait kemiskinan di Indonesia tahun 2000 hingga 2015 :

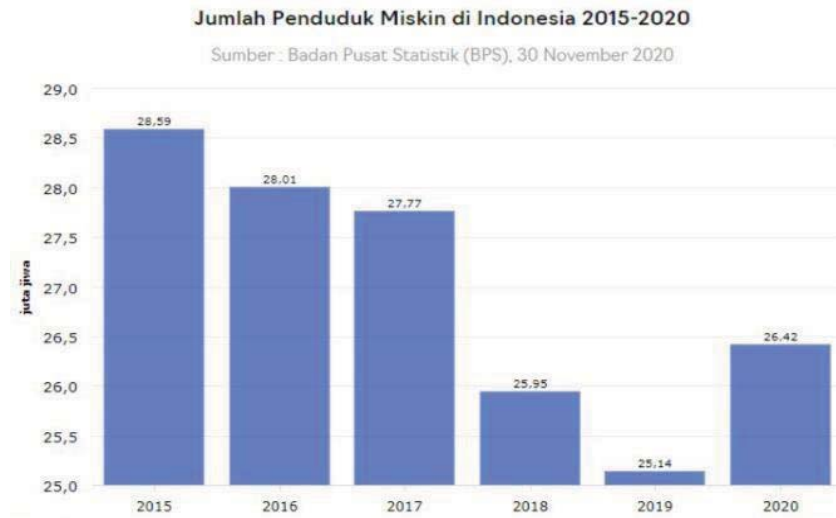
Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2015

Tahun	Penduduk Kota	Penduduk Desa
2000	12.310.000	26.430.000
2001	8.600.000	29.270.000
2002	13.320.000	25.080.000
2003	12.260.000	25.080.000
2004	11.370.000	24.780.000
2005	12.400.000	22.700.000
2006	14.490.000	24.810.000
2007	13.560.000	23.610.000
2008	12.770.000	22.190.000
2009	11.910.000	20.620.000
2010	11.100.000	19.930.000
2011	10.950.000	18.940.000
2012	10.510.000	18.090.000
2013	10.630.000	17.920.000
2014	10.360.000	17.370.000
2015	10.620.000	17.890.000

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data diatas yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, kondisi kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2000-2015 mengalami fluktuasi.

Kemiskinan di Indonesia tidak berhenti pada tahun 2015. Kemiskinan di Indonesia masih terjadi pada tahun 2016-2020. Berikut data kemiskinan yang terjadi di Indonesia :



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia 2015-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Data diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa, tahun 2016 sebesar 28,01 juta jiwa, tahun 2017 sebesar 27,77 juta jiwa, tahun 2018 sebesar 25,95 juta jiwa, tahun 2019 sebesar 25,14 juta jiwa, dan tahun 2020 sebesar 26,42 juta jiwa.

Kemiskinan di Indonesia berlanjut hingga 2022. Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak orang terutama pada sektor perekonomian. Covid-19 adalah virus yang terdapat di kota Wuhan, Cina. Virus Covid-19 yang muncul sebagai penularan dari hewan ke manusia, berhubungan dengan pasar yang menjual daging hewan yang jarang dimakan oleh manusia. Penularan virus Covid-19 terjadi ketika manusia memakan daging di pasar hewan. Virus Covid-19 dapat menyebabkan infeksi dan kegagalan organ. Gejala pertama orang yang terinfeksi virus Covid-19 ditandai dengan demam, batuk kering, sakit kepala, pusing, dan sesak napas.

Covid-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Adapun pasien yang terpapar virus Covid-19 berjumlah dua orang yang berasal dari Kota Depok. Dua orang tersebut yakni perempuan yang berusia 31 tahun dan 64 tahun. Masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang positif Covid-19,

sembuh dari Covid-19, atau bahkan meninggal akibat Covid-19. Berikut merupakan data sebaran Covid-19 di Indonesia :



Gambar 1. 2 Sebaran Covid-19 di Indonesia

Sumber : Covid19.go.id

Data tersebut menjelaskan kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 4.239.396 orang, kasus sembuh dari Covid-19 berjumlah 4.081.417 orang, dan meninggal akibat Covid-19 berjumlah 143.176 orang. Dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwa kasus Covid-19 masih ada dan belum selesai. Adanya kasus Covid-19 di Indonesia yang belum selesai berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.

Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Upaya yang tepat harus dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan membuat kebijakan dan program. Program yang dibuat pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan yaitu Program Raskin. Program tersebut dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2002. Program Raskin adalah singkatan dari Beras Miskin yang artinya program untuk menanggulangi kemiskinan serta perlindungan sosial di bidang pangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat berupa bahan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan dibuat program Raskin adalah mengurangi

beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras (Kemendagri, n.d.). Bantuan sosial Raskin didapatkan dengan menebus beras seharga Rp. 1.600/kg. Tempat distribusi Raskin dilakukan di desa/kelurahan yang mudah dijangkau oleh keluarga sasaran. Pada tahun 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengubah nama Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras Sejahtera (Rastra). Perubahan nama tersebut bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa bantuan beras hanya untuk membantu masyarakat miskin. Setelah mengganti nama program menjadi Beras Sejahtera (Rastra), pemerintah berharap dapat membuat hidup masyarakat semakin sejahtera. (Damanik, 2015).

Bantuan sosial Rastra yang didapatkan oleh masyarakat hanya berupa beras yang ditebus murah oleh keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berpendapat bahwa “Setelah disubsidi harga beras per kilo yang harus dibayar masyarakat adalah Rp. 1.600. Jika setiap bulan satu keluarga membutuhkan 15 kilo berarti harus bayar Rp. 24.000. Banyak keluarga miskin yang saya temukan dia tidak bisa membayar sebesar itu”. Pemerintah berupaya mengubah subsidi tersebut menjadi beberapa bahan pangan untuk dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) (Erdianto, 2016).

Atas dasar itu, pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah kepada menterinya tentang perwujudan sistem keuangan nasional yang inklusif; penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai telah digantikan dengan metode non tunai melalui sistem perbankan untuk memudahkan pemantauan, pengendalian, meminimalisir kesalahan dan mengintegrasikan kartu multiguna dalam penyaluran dana bantuan sosial dalam satu kartu (Mawardi et al., 2017). Menteri Sosial telah mengarahkan seluruh jajarannya agar semua program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terkoordinasi agar berdampak efektif. KPM membutuhkan pendamping dan menjadikan pendamping tersebut sebagai sumber informasi. Kementerian

Sosial menyalurkan bantuan sembako melalui e-Warong agar menghindari penyimpangan, memudahkan kontrol, dan tepat sasaran terkait jumlah dan waktu.

Untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyaluran bantuan sosial dan mewujudkan prinsip 4T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi, maka Presiden Joko Widodo mengarahkan Kementerian Sosial agar menyalurkan bantuan sosial secara non tunai. Pada bulan Juni 2016 Kementerian Sosial melakukan percobaan bantuan sosial non tunai dengan mewujudkan program Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong). Program e-Warong adalah sebuah kerja sama Kementerian Sosial dengan bank penyalur untuk memberikan bantuan sosial secara non tunai. E-Warong dirancang dalam bentuk toko untuk menjual bahan pangan pokok menggunakan teknologi. Pola distribusi e-Warong memiliki perbedaan dengan pola distribusi sebelumnya menggunakan Kantor Pos dan desa/kelurahan sebagai tempat pengambilan bantuan sosial. Transaksi pada e-Warong dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dan kartu keluarga sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi.

Berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial secara non tunai, maka tahun 2016 Kementerian Sosial melakukan uji coba bantuan sosial non tunai dengan prinsip; (i) seluruh penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank; (ii) semua bantuan sosial akan masuk ke dalam rekening tersebut; (iii) pencairan bantuan dilakukan melalui e-Warong; dan (iv) pencairan bantuan dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera yang berfungsi sebagai alat transaksi pencairan bantuan sosial.

E-Warong dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, dan dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pasal 1 ayat 7 yang berbunyi :

“Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur”

Pada tahun 2016, Kementerian Sosial bekerjasama dengan bank penyalur untuk memberikan bantuan sosial berupa non tunai. Bantuan sosial tersebut dinamakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi program Rastra agar dapat meningkatkan ketepatan sasaran program, efektifitas, dan mendorong inklusi keuangan. Penyaluran BPNT disalurkan menggunakan sistem perbankan. Dalam Program BPNT, KPM mendapatkan bantuan berupa non tunai yang disalurkan melalui KKS. Bantuan tersebut dapat dibeli bahan pangan berupa beras dan telur melalui e-Warung. Program BPNT diharapkan mampu menghasilkan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan KPM melalui pelayanan yang lebih luas terhadap layanan transaksi keuangan.

Penentuan KPM BPNT dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2017 terdapat perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data terpadu yang diberi nama data program penanganan fakir miskin dan orang yang tidak mampu (DD-PPFM dan OTM) serta data Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Pusdatin, 2020).

Penetapan DTKS dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun. Kementerian Sosial mendapatkan data masyarakat miskin dari Basis Data Terpadu (BDT) yang diambil dari sensus BPS tahun 2015. Jadi semua calon penerima BPNT datanya bersumber dari BDT dalam SIKS-NG Kementerian Sosial. Oleh karena itu kecamatan/kelurahan melakukan *up to date* dengan memasukkan

data calon KPM sekaligus menghapus KPM yang tidak layak/pindah/meninggal dibuktikan dengan KK dan KTP yang bersangkutan (Juragan Desa, n.d.).

Pada tahun 2020 untuk mewujudkan peningkatan efektivitas dan penguatan perlindungan sosial bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako. Program Sembako memiliki perluasan dalam jenis komoditas, sehingga KPM bisa membeli bahan pangan tidak hanya berupa telur dan beras saja. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar mendapatkan bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

BPNT diberikan dalam bentuk non tunai setiap bulannya melalui akun elektronik untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Setiap KPM memiliki rekening sebagai alat transaksi yang dapat dilakukan di e-Warong. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah alat pembayaran berupa kartu yang digunakan sebagai alat penyaluran BPNT. Jumlah bantuan sosial yang didapatkan dari BPNT terus berubah. Pada awal penyaluran BPNT bantuan yang semula senilai Rp. 110.000/bulan naik menjadi Rp.150.000/bulan, lalu sekarang naik lagi menjadi Rp. 200.000/bulan. Kenaikan bantuan senilai Rp. 200.000/bulan diberikan sebagai upaya untuk mengatasi dampak Covid-19. BPNT yang telah ditransfer dapat ditukar dengan cara membeli sembako melalui e-warong terdekat. Pengelola e-Warong terdiri dari keluarga penerima manfaat yang berjumlah 10 pengurus, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang sebelumnya telah diberikan bimbingan teknis.

Kementerian Sosial juga bekerjasama dengan Dinas Sosial masing-masing daerah untuk menyalurkan BPNT. Dinas Sosial memiliki tugas memperbaiki data agar valid dan sinkron dengan data Pusdatin Kementerian Sosial, melakukan rekonsiliasi, melakukan pengawasan dan pengendalian pada saat penyaluran BPNT, dan melakukan pelaporan kepada Kementerian Sosial (Humaniora, 2019). Peran Dinas Sosial dalam melakukan pengawasan BPNT tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya pasal 11 ayat 2 mengenai fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial;
- b. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, dan pendampingan;
- d. Pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2016, e-Warong pertama kali didirikan di Kota Malang sebagai percontohan penerapan layanan warung non tunai. Kota Malang menjadi wilayah pertama didirikan e-Warong karena Kota Malang memiliki 5 kecamatan yang tergolong sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Jumlah kecamatan yang sedikit di Kota Malang, diharapkan edukasi mengenai e-Warong di Kota Malang dapat merata dan menjangkau seluruh KPM, sehingga Kota Malang dipilih sebagai daerah pertama pendirian e-Warong (Indira Putri Pramesti, 2018).

Selain Kota Malang, Kota Surabaya juga menjadi kota yang menerapkan e-Warong. Khofifah Indah Parawansa dengan Menteri BUMN Rini Soemarno meluncurkan e-Warong pertama di Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2016 di Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Sidosermo (Gewati, 2016). Pada tahun 2016 hingga saat ini e-Warong di Surabaya semakin bertambah. Jumlah keseluruhan total e-Warong di Surabaya berjumlah 37. Berikut merupakan e-Warong yang terdapat di Surabaya :

Tabel 1. 2 E-Warong di Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama E-Warong
1	Asemrowo	Asemrowo	E-Warong Tambak Dalam
2	Gayungan	Ketintang	E-Warong Berkah Jaya
3	Gubeng	Airlangga	E-Warong Barokah Sejahtera
4	Gubeng	Mojo	Sub E-Warong Mojo Agung
5	Gubeng	Mojo	E-Warong Mojo Agung 3
6	Kenjeran	Bulak Banteng	E-Warong Flamboyan
7	Kenjeran	Sidotopo Wetan	E-Warong Lavender
8	Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sub E-Warong Lavender
9	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	E-Warong Arum Wangi
10	Lakarsantri	Bangkingan	E Waroeng Ploso Makmur
11	Lakarsantri	Jeruk	E Waroeng Jeruk Manis
12	Lakarsantri	Lidah Wetan	E Waroeng Wetan Agung
13	Mulyorejo	Kalisari	E-Warong Kalisari
14	Pabean Cantikan	Bongkaran	Bpsu Bongkaran Sejahtera
15	Pakal	Pakal	E-Warong Rezeki Lancar
16	Sambikerep	Sambikerep	E Waroeng Sambikerep Sukses
17	Sawahan	Putat Jaya	E-Warong Mawar Sejahtera
18	Sawahan	Sawahan	E-Warong Sawahan Jaya
19	Semampir	Ampel	Bpsu Samara
20	Semampir	Ujung	Bpsu Jaya Barokah 1
21	Semampir	Wonokusumo	Bpsu Anugerah
22	Simokerto	Sidodadi	Bpsu Sidodadi Berkah
23	Simokerto	Simolawang	Bpsu Bolodewo
24	Simokerto	Simolawang	Bpsu Kebon Dalem
25	Simokerto	Simolawang	Bpsu Simolawang Abadi
26	Simokerto	Tambakrejo	Bpsu Tambakrejo
27	Sukolilo	Keputih	E-Warong Keputih Sentosa
28	Sukolilo	Klampis Ngasem	E-Warong Klampis
29	Sukomanunggal	Simomulyo Baru	E-Warong Maju Jaya
30	Tambaksari	Pacar Keling	Bpsu Pakel Jaya
31	Tandes	Manukan Kulon	E-Warong Barokah
32	Tenggiling Mejoyo	Kendangsari	Sub E-Warong Barokah Jaya
33	Wiyung	Babatan	E-Warong Makmur Barokah
34	Wiyung	Wiyung	Sub E-Warong Barokah
35	Wonocolo	Jemurwonosari	E-Warong Jemur Harapan
36	Wonocolo	Sidosermo	E-Warong Sidosermo

37	Wonokromo	Ngagel rejo	E-Warong Ngagelrejo Sembada
----	-----------	-------------	-----------------------------

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya

Kota Surabaya termasuk dalam ibu kota Provinsi Jawa Timur dan menjadi kota metropolitan di Jawa Timur dengan memiliki 31 kecamatan. Kota Surabaya memiliki jumlah kecamatan yang lebih banyak dibandingkan dengan Kota Malang. Kota Surabaya memiliki banyak penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk sebanyak 2,87 juta jiwa pada tahun 2020 (Budy, 2021). Banyaknya kecamatan dan banyaknya penduduk di Surabaya, menyebabkan timbulnya kemiskinan di Kota Surabaya. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, penduduk miskin di Surabaya pada tahun 2020 sebesar 145,67 ribu jiwa. Menurut Wakil Wali Kota Surabaya di tahun 2021 kemiskinan Kota Surabaya meningkat menjadi 152,49 ribu jiwa (BPS, 2021). Peningkatan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya aktivitas perekonomian di Surabaya yang masih kembali normal karena dampak Covid-19.

Kota Surabaya juga menjadi kota pertama penyaluran BPNT oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerjasama dengan BNI untuk melaksanakan penyaluran BPNT secara perdana. BPNT diberikan sebulan senilai Rp. 200.000 untuk dibelanjakan ke e-Warong dalam bentuk bahan pangan. Pada tahun 2017, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan penyaluran BPNT pertama di Kota Surabaya untuk 72.590 KPM yang dilakukan di Gedung Olahraga Bung Tomo. KPM dapat membeli kebutuhan pangan yang sudah ditentukan di e-Warong wilayah terdekat (Asim, 2017).

Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Data MBR digunakan untuk acuan intervensi bidang bantuan warga Surabaya, seperti bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan (Pemkot Surabaya, 2020). Untuk menjadi KPM BPNT, masyarakat harus mengajukan MBR dengan cara (Avilia, 2022) :

- a. Mengajukan ke RT/RW dengan membawa KTP dan KK;
- b. NIK akan diverifikasi RT melalui aplikasi E-Pemutakhiran Data;
- c. Kelurahan akan melakukan verifikasi usulan tersebut, apabila tidak ditemukan maka usulan ditolak;
- d. Dinas Sosial melakukan survei sesuai usulan yang diverifikasi kelurahan;
- e. Skoring hasil survey (penentuan masuk MBR atau tidak);
- f. Dinas Sosial melakukan seleksi data warga yang masuk ke dalam MBR;
- g. Melakukan pengecekan pada website E-Pemutakhiran Data untuk mengetahui lolos atau tidak dalam penerimaan MBR.

Pelaksanaan penyaluran BPNT melalui e-Warong di Surabaya masih ditemukan permasalahan. Berikut merupakan berbagai permasalahan yang terjadi penyaluran Bantuan Pangan melalui e-Warong di Kota Surabaya tahun 2017 dan 2021:

Tabel 1. 3 Permasalahan BPNT di Surabaya

Tahun	Permasalahan	Sumber
2017	Pemberlakuan BPNT perlu disosialisasikan. Sebagian masyarakat masih merasa kesulitan dan kecemasan. Menteri Sosial berpendapat bahwa : <i>“Ini wajar karena belum terbiasa. Inilah peran pendamping harus menyikapi persoalan teknis program bantuan dari pemerintah ini”</i> . Dalam penggunaan e-Warong pada tahun 2017 masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa kesulitan (Faiq, 2017).	Dikutip dari situs Surya.co.id, oleh Nuraini Faiq, pada Kamis 2 Maret 2017.
2017	Pada tahun 2017, ibu Chutini, warga Tandes Kidul merasa kesulitan saat mencoba transaksi di e-Warong. Ibu Chutini belum terbiasa menggunakan Kartu Keluarga	Dikutip dari situs Surya.id, oleh Fatimatuz Zahroh, pada Minggu 12 Februari 2017.

	Sejahtera. Ibu Chutini berpendapat bahwa : “ <i>Saya belum pernah punya tabungan. Ini baru pertama kalinya punya uang di bank. Makanya minta bantuan petugas</i> ” (Zahroh, 2017).	
2017	Keluarga penerima manfaat di Surabaya menangis karena program e-Warong. Ibu tersebut menangis karena takut uangnya tidak bisa cair. Cerita ibu menangis tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Timur. “ <i>Contohnya di Benowo beberapa waktu lalu sampai ada yang menangis. Ibu ini takut uangnya tidak bisa keluar dan hangus kalau salah</i> ”, kata Sukei selaku Kepala Dinas Sosial Jawa Timur (Faiq, 2017).	Dikutip dari situs Surya.id, oleh Nuraini Faiq, pada Kamis 2 Maret 2017.
2017	Masih banyak masyarakat yang belum memahami program e-Warong. Bahkan masih ada warga takut tidak mendapatkan jatah sembako. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa seluruh KPM pasti mendapatkan BPNT. “ <i>Tidak mungkin tidak kebagian karena di top up terus di buku tabungannya, mungkin kurang sosialisasi saja</i> ” “ <i>Ini kan program baru, jadi wajar kalau beberapa warga belum tahu, tapi kita akan terus bersosialisasi</i> ” ucap Sukei selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Arif, 2017).	Dikutip dari situs TribunJatim.com, oleh Sofyan Arif Candra Sakti, pada Jumat 3 Maret 2017.
2021	Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mendapatkan laporan dari para RW di Kelurahan Wonokromo terkait kendala BPNT pada tanggal 28-31 Desember 2021. Reni Astuti berpendapat bahwa : “ <i>Mereka menyampaikan perihal pencairan BPNT yang bermasalah seperti sudah punya kartu BPNT tapi saldo kosong. Lalu ada juga yang terdata KPM BPNT di kelurahan/kecamatan tapi waktu pengambilan di bank terkait, identitas KPM tidak terdata</i> ” (Gunawan, 2022).	Dikutip dari beritajatim.com, oleh Ade Mas Satrio Gunawan, pada 7 Januari 2022.

Sumber : Berbagai berita *online*

Berdasarkan permasalahan e-Warong diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masyarakat masih merasa kesulitan terkait teknis transaksi di e-Warong dan masih terdapat saldo kosong pada saat penyaluran BPNT. Dinas Sosial memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti melakukan penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Indira Putri Pramesti dengan judul “Implementasi Program E-Warong KUBE Srikandi Di Kota Malang Tahun 2017 (Studi di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen)”. Hasil penelitian ini adalah implementasi program pada e-Warong KUBE “Srikandi” masih belum optimal karena masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai diantaranya permasalahan pada teknis, sifat populasi yang tidak mampu menjangkau selain Kelurahan Bareng, kurang mengembangkan kegiatan e-Warong, kurangnya akses formal pihak lain, kurangnya dukungan publik, terdapat KPM yang menolak program, dan kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian pertama yaitu berfokus pada implementasi program e-Warong KUBE, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan program BPNT melalui e-Warong. Penelitian terdahulu pertama menggunakan teori pendekatan top-down model implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Robbins dan Coulter terkait proses pengawasan. Lokasi penelitian terdahulu pertama berada di e-Warong KUBE Srikandi Kota Malang, sedangkan penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kota Surabaya (Indira Putri Pramesti, 2018).

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Anggi Anggrayni Siregar dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warong Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu”. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua indikator yang tidak bermasalah yaitu indikator tepat sasaran dan tepat waktu. Kendala selanjutnya yaitu rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang program BPNT dan rendahnya tingkat kepatuhan implementor yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Penelitian terdahulu kedua berfokus pada implementasi program BPNT melalui e-Warong, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan program BPNT melalui e-Warong. Teori yang digunakan penelitian terdahulu kedua menggunakan teori implementasi menurut Merille S. Grindle yaitu dari aspek isi kebijakan dan dari aspek lingkungan kebijakan. Sedangkan teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori Robbins dan Coulter. Penelitian terdahulu kedua berlokasi di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kota Surabaya (Siregar, 2019).

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Dita Risdianah dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Petugas Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD di Kota Surabaya”. Hasil penelitian dalam pelaksanaan sistem pengawasan petugas parkir belum maksimal. Hal tersebut disebabkan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum sesuai SOP, personil pengawas kurang memadai, sumber daya keuangan belum memadai, dan jadwal pelaksanaan belum dijalankan dengan baik karena pengawasan juga berfokus pada tugas lainnya (Risdianah, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu ketiga dan penelitian yang peneliti teliti. Perbedaan tersebut terletak pada teori, lokasi, dan fokus penelitian. Teori pada penelitian terdahulu keempat menggunakan teori pengawasan Joko Widodo dengan unsur-unsur pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, sumber daya keuangan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan, sedangkan teori pada penelitian ini memakai teori Robbins dan Coulter yang memiliki elemen-elemen *standards*, *measurement*, *compare*, dan *action*. Perbedaan ketiga terletak pada lokasi. Lokasi penelitian terdahulu ketiga dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sedangkan lokasi penelitian peneliti berada di Dinas Sosial Kota Surabaya. Kemudian fokus penelitian

terdahulu ketiga berfokus pada komponen penting pengawasan, sedangkan peneliti berfokus pada proses pengawasan.

Penelitian terdahulu keempat ditulis oleh Tesalonika Bororing, Alfon Kimbai, dan Neni Kumayas dengan judul “Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Modoinding”. Hasil penelitian ini adalah permasalahan terkait sembako yang disalurkan tidak tepat jumlah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengakibatkan banyaknya laporan serta keluhan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Dinas Sosial melakukan pengawasan namun pengawasan yang diterapkan belum menjawab keluhan dari masyarakat khususnya anggota penerima. Penelitian terdahulu keempat memiliki kesamaan pada pengawasan Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Lokasi penelitian terdahulu keempat dilakukan di Kecamatan Modoinding, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya (Bororing et al., 2022).

Penelitian terdahulu kelima ditulis oleh Riska Saiful dengan judul “Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Bupati Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian ini adalah pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai sudah berhasil (Saiful, 2020). Pada penelitian terdahulu kelima berfokus pada pengawasan kinerja pegawai, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pengawasan program yang dilaksanakan oleh dinas. Selanjutnya teori terdahulu kelima menggunakan teori Sondang P. Siagian dengan tiga elemen yaitu penentuan standar hasil, pengukuran hasil pekerjaan, dan koreksi terhadap penyimpangan. Sedangkan peneliti menggunakan teori Robbins dan Coulter dengan menggunakan tiga elemen *standards, measurement, compare*, dan *action*. Lokasi penelitian terdahulu kelima berada di Kantor Bupati Kabupaten Enrekang, sedangkan peneliti di Dinas Sosial Kota Surabaya.

Penelitian terdahulu keenam ditulis oleh Muh Dicky Zulkarnain dengan judul “Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PLTU Bosowa Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian

ini yaitu pengawasan Pemerintah Daerah sudah berjalan sesuai dengan rencana sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu kelima memakai teori karakteristik pengawasan efektif oleh Handoko dengan lima elemen yaitu akurat dan tepat waktu, obyektif, terpusat, realistik, dan bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sedangkan peneliti menggunakan teori Robbins dan Coulter proses pengawasan yang memiliki elemen-elemen *standards, measurement, compare, dan action*. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jeneponto, PLTU Bosowa, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi selatan, dan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Surabaya (Dicky, 2018).

Penelitian terdahulu ketujuh ditulis oleh Riska Amelia Melda Malik dengan judul “Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa”. Hasil dari penelitian ini yaitu fungsi pengawasan inspektorat daerah sudah baik terlihat dari koordinasi dan perbaikan dalam menangani masalah, serta mendatangkan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan (Malik, 2019). Teori penelitian terdahulu menggunakan teori fungsi pengawasan yang terdiri dari tiga elemen yaitu pemeriksaan, perbaikan, dan penilaian. Sedangkan peneliti menggunakan teori Robbins dan Coulter proses pengawasan yang memiliki elemen-elemen *standards, measurement, compare, dan action*. Selanjutnya lokasi penelitian terdahulu ketujuh terletak di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, sedangkan lokasi penelitian peneliti terletak di Dinas Sosial Kota Surabaya.

Penelitian terdahulu kedelapan ditulis oleh Huan Qingzhi dengan judul “*Regional Supervision Centres for Environmental Protection in China: Functions and Limitations*”. Penelitian terdahulu kedelapan membahas tentang perbaikan lingkungan di China yang memburuk dengan memperkuat pengawasan vertikal penegakan hukum dan kebijakan lingkungan dengan

menetapkan enam Supervision Centres for Environmental Protection (SCEPs) tahun 2011. Hasil penelitian ini adalah SCEPs telah berhasil dalam mengubah lingkungan China lebih baik (Huan, 2011). Perbedaan penelitian kedelapan membahas mengenai perbaikan lingkungan di China dengan menggunakan SCEPS tahun 2011, sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas mengenai pengawasan program BPNT melalui e-Warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya memakai teori Robbins dan Coulter yang memiliki *standards, measurement, compare, dan action* pada proses pengawasan.

Penelitian terdahulu kesembilan ditulis oleh Patricia-Luciana, Cosmin, dan Laurentiu dengan judul “*The Socio-Communicational Style and the Need for Supervision of Professionals from the Social Services*”. Hasil penelitian kesembilan yaitu pendidikan adalah cara terbaik yang diterima dalam pengawasan dan pengembangan profesional dipandang sebagai keunggulan supervisi (Runcan et al., 2012). Perbedaan penelitian terdahulu kesembilan menggunakan empat dimensi, yaitu *a professional view, a social support dimensions, emphasizes learning, supervision as aeducation, dan control*. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan teori Robbins dan Coulter yang memiliki *standards, measurement, compare, dan action* pada proses pengawasan. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu kesembilan pada profesional Dinas Sosial yang terlibat dalam pengawasan psikolog dan pekerja sosial, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada pengawasan program BPNT melalui e-Warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.

Penelitian terdahulu kesepuluh ditulis oleh Antonio Sandu dan Elena Unguru dengan judul “*Supervision of Social Work Practice in North-Eastern Romanian Rural Areas*”. Hasil dari penelitian terdahulu kesepuluh yaitu pekerja sosial dari daerah pedesaan mendukung gagasan pengawasan, dan pengawasan dilihat sebagai pemantauan resolusi mereka (Sandu & Unguru, 2013). Perbedaan penelitian terdahulu kesepuluh berfokus pada fungsi pengawasan dengan menggunakan Grounded Theory, sedangkan penelitian

yang peneliti teliti menggunakan teori Robbins dan Coulter yang memiliki *standards, measurement, compare*, dan *action* pada proses pengawasan. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu kesembilan pada profesional Dinas Sosial yang terlibat dalam pengawasan psikolog dan pekerja sosial, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada pengawasan program BPNT melalui e-Warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya” untuk mengetahui proses pengawasan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan BPNT melalui e-Warong.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-Warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penyaluran BPNT melalui e-Warong di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dilihat dari segi akademis dan segi praktis. Berikut merupakan manfaat penelitian dari segi akademik dan praktis :

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dan dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian terdahulu terkait pengawasan. Manfaat akademis dari penelitian “Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya” bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai peran pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Dinas Sosial Kota

Surabaya dalam melaksanakan pengawasan penyaluran program BPNT melalui e-Warong di Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dan menjadi solusi dalam penerapan Administrasi Publik khususnya dalam pengawasan pelaksanaan program. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan jawaban serta solusi atas rumusan masalah dan penelitian terdahulu untuk melengkapi kesenjangan dari permasalahan pengawasan BPNT melalui e-warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan pertimbangan, saran, masukan, dan rujukan bagi Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan program BPNT yang disalurkan melalui e-Warong di Surabaya agar menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaannya.

1.5 Kerangka Teori

Menurut Jonathan H. Turner, teori adalah sebuah mengembangkan suatu ide-ide yang dapat membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah kejadian dapat terjadi. Selanjutnya Masri Singarimbun dan Sofian effendi, teori adalah serangkaian konsep, asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun & Efendi, 1998). Sedangkan menurut Suyanto, teori adalah seperangkat proposisi yang menggambarkan gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih (Suyanto Bagong & Sutinah, 2005).

1.5.1 Pengawasan

1.5.1.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengukur pelaksanaan kegiatan. Adanya pengawasan dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam kegiatan. Pengawasan juga merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan dilakukan untuk melakukan pengontrolan dan melakukan pemeriksaan dari pimpinan organisasi kepada pihak anggota organisasi. Dalam buku *Pengendalian Dalam Organisasi*, pengendalian merupakan bagian tidak terpisahkan dalam fungsi pengawasan. Pengendalian menghendaki adanya tujuan dan rencana. Dalam perencanaan akan menghasilkan suatu rencana yang merupakan dokumen resmi (Sugiyanto, 2016).

Konsep pengendalian berkaitan dengan pengawasan dan bagian dari proses pengukuran kinerja. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan semesynya, maka kegiatan tersebut perlu dikendalikan (Sugiyanto, 2016).

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan ialah sebuah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memberikan jaminan agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Robert J. Mockler. Penjelasan tersebut berisi bahwa pengawasan manajemen ialah usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan yang memiliki tujuan perencanaan, membuat rancangan sistem informasi, melakukan perbandingan, umpan balik, melakukan pengukuran, serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan (Reksohadiprodjo, 2016).

Pendapat lain dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (1996:159) bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen,

yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan serta menjamin bahwa tujuan sasaran serta tugas organisasi akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan manapun. Hakikat pengawasan yaitu untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1996).

Berdasarkan beberapa penjelasan, kesimpulannya adalah pengawasan termasuk salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan maka kegiatan dapat dengan mudah terkontrol sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai pada suatu organisasi.

1.5.1.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir, tujuan pengawasan adalah (Situmorang, 1994) :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru;
3. Mengetahui *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak;
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*.

1.5.1.3 Proses Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terdapat langkah-langkah menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert yaitu (Stoner et al., 1995) :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan dan Tolak Ukur

Standar pengawasan dan tolak ukur digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil kinerja. Penetapan standar pelaksanaan dan tolak ukur penting dilakukan karena standar pelaksanaan dan tolak ukur merupakan dasar peraturan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan cara yang dilakukan agar mengetahui kesesuaian kinerja dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila terdapat penyimpangan, maka dapat dilakukan pengukuran penyimpangan dan bagaimana cara untuk mengatasinya.

3. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Pengawasan

Dalam proses ini, pengukuran yang dilakukan terhadap obyek pengawasan harus menghasilkan informasi yang obyektif.

4. Pengambilan Tindakan Korektif

Pengambilan tindakan korektif dilakukan apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan pengawasan. Pengambilan tindakan korektif sangat penting untuk memperbaiki pengawasan agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan teori Robbins dan Coulter dalam melakukan proses pengawasan program. Terdapat beberapa proses pengawasan yang harus dipahami oleh pengawas. Robbins dan Coulter mengatakan bahwa pengawasan terdapat beberapa proses, yaitu (Robbins, 2009) :

- 1) *Standards* (Menetapkan Standar)

Standar digunakan untuk menetapkan patokan atau hasil yang diinginkan dalam melakukan pengawasan. Penetapan standar dilakukan untuk melakukan perbandingan dalam kegiatan

organisasi. Standar pelaksanaan merupakan dasar peraturan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan.

2) *Measurement* (Pengukuran)

Pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan untuk menghasilkan keadaan atau situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil dari pengukuran lalu dilakukan perbandingan dengan standar yang sudah ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter, pengukuran pelaksanaan dilakukan melalui :

a) Observasi Pribadi

Observasi secara pribadi dilakukan dengan cara menghadiri secara langsung kegiatan dan memperhatikan aktivitas yang dilakukan. Observasi pribadi memiliki keuntungan yaitu memperoleh pengetahuan pertama kali, informasi tidak tersaring, dan ulasan yang intensif terhadap aktivitas kerja.

b) Laporan lisan

Laporan lisan dilakukan dengan melakukan wawancara dan mengajak diskusi. Laporan lisan memiliki keuntungan yaitu cepat mendapatkan informasi, dan memungkinkan umpan balik verbal dan non verbal.

c) Laporan tertulis

Laporan tertulis berisi data menyeluruh dan dimanfaatkan untuk membuat laporan kejadian yang bermutu. Laporan tulisan dapat digunakan sebagai catatan apabila seseorang memerlukan untuk mengadakan perbandingan atau kajian mengenai suatu permasalahan. Laporan tertulis memiliki keuntungan yaitu komprehensif, formal, dan mudah disimpan untuk dilihat kembali.

3) *Compare* (Membandingkan)

Compare adalah suatu proses perbandingan hasil pengukuran yang dilakukan dengan standar yang ditetapkan. Hasil dari *compare*

dapat menghasilkan kinerja lebih tinggi, kinerja lebih rendah, atau sama dengan standar.

4) *Action* (Melakukan Tindakan)

Action adalah sebuah pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan dalam pengawasan apabila terjadi penyimpangan.

1.5.2 Program

1.5.2.1 Pengertian Program

Kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut sudah dikembangkan dalam bentuk program. Pengertian program adalah kumpulan yang nyata, terpadu, dan sistematis dilaksanakan oleh organisasi pemerintah dalam rangka melakukan kerja sama dengan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Jabar, menjelaskan ada dua pengertian program secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum yaitu diartikan sebagai rencana. Sedangkan pengertian program secara khusus yaitu kesatuan kegiatan yang berupa implementasi atau realisasi kebijakan, melalui proses berkesinambungan dan melibatkan beberapa kelompok.

1.5.2.2 Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan sosial non tunai biasa disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT ialah bantuan sosial pangan yang berbentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan menggunakan akun elektronik untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan bank mitra (Irwan, 2019). BPNT diberikan setiap bulannya berupa uang Rp. 110.000 - Rp. 200.000 per keluarga penerima manfaat.

1.5.3 Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong)

E-Warong adalah hasil kolaborasi Kementerian Sosial dengan bank penyalur sebagai tempat untuk melakukan distribusi BPNT. E-Warong dirancang dalam bentuk tempat untuk menjual bahan pangan pokok dengan memanfaatkan teknologi. Pola distribusi e-Warong memiliki perbedaan dengan

mekanisme sebelumnya yang menggunakan Kantor Pos Indonesia sebagai titik penyaluran bantuan sosial tunai menggunakan kupon. Transaksi pada e-Warong dilakukan dengan menggunakan mesin EDC dan KKS sebagai alat transaksi.

1.5.4 Keluarga Penerima Manfaat

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi rendah, namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai, dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

1.6 Definisi Konsep

Berikut merupakan definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pengawasan

Pengawasan ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan pemantauan yang bertujuan agar suatu program dapat terhindar dari penyimpangan dan memastikan program dapat berjalan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2. Program

Kegiatan atau aktivitas sosial berupa realisasi yang berproses secara berkesinambungan, melibatkan beberapa orang, dan terjadi dalam organisasi.

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan sosial pangan atau sembako berbentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM setiap bulan ke rekening masing-masing yang dapat diambil ke e-warong terdekat menggunakan KKS.

4. Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong)

E-Warong adalah lokasi/tempat penyaluran BPNT yang dibuat oleh Kementerian Sosial dengan bank penyalur untuk membantu KPM dalam pembelian bahan pangan dengan memanfaatkan teknologi.

5. Keluarga Penerima Manfaat

KPM adalah masyarakat yang mendapatkan BPNT berdasarkan data dari Kementerian Sosial.

6. *Standards*

Penetapan standar adalah dasar peraturan pelaksanaan kegiatan yang dibuat untuk melakukan penilaian terhadap suatu program sehingga dapat mencapai tujuan.

7. *Measurement*

Cara atau proses yang digunakan dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

8. *Compare*

Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbandingan kinerja organisasi dengan standar agar mengetahui hasil dari program telah sesuai dengan standar atau tidak.

9. *Action*

Perbaikan yang dilakukan organisasi apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan pengawasan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Metode Penelitian

Metode penelitian adalah landasan dalam pencarian data untuk menunjang keberhasilan suatu penelitian yang akan dilakukan. Menurut Cresswell dalam bukunya “Research Design”, metode kualitatif membahas mengenai rancangan yang digunakan, membahas sampel penelitian, dan pengumpulan prosedur perekaman data secara keseluruhan. Selanjutnya dibahas langkah-langkah analisis data dan metode yang digunakan untuk menyajikan data, menginterpretasikannya, memvalidasinya, dan menunjukkan potensi hasil penelitian (John W. Cresswell, 2016). Metode penelitian adalah keseluruhan kerangka berfikir untuk merumuskan masalah, menjabarkan kerangka teori, pengumpulan data dan pengujian data empiris, dan penjelasan

suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Metode penelitian memiliki strategi untuk mengumpulkan data dan analisis data untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan agar memahami fenomena yang dimiliki oleh subjek penelitian.

Bogdan, Robert dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari masyarakat dan perilaku yang diamati dengan berfokus pada permasalahan (Bogdan et al., 1992). Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengetahui pendapat langsung dari masyarakat terhadap pengawasan pelaksanaan program BPNT melalui e-Warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Peneliti juga ingin mengetahui proses pengawasan pelaksanaan program BPNT melalui e-Warong yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dengan berbagai permasalahan yang ada dan cara untuk mengatasinya.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Furchan, penelitian deskriptif memiliki karakteristik menjelaskan suatu fenomena apa adanya, mengutamakan objektivitas dan dilakukan dengan cermat. Menurut Suharsimi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan pengumpulan informasi terkait keadaan atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan pelaksanaan program BPNT melalui e-Warong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena fakta dan permasalahan yang terjadi pada proses pengawasan program BPNT melalui e-Warong lebih mudah dianalisis menggunakan penggambaran lebih mendalam secara terinci untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penyaluran BPNT melalui e-Warong.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan agar si peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Dengan adanya lokasi penelitian, maka objek dan tujuan yang telah dibuat dapat dipermudah dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian memberikan informasi yang valid untuk membantu menemukan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim No. 131-133, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penelitian selanjutnya berada di lokasi e-Warong dan rumah KPM.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ialah seseorang yang mempunyai informasi terkait objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan yaitu teknik *purposive sampling*. Dalam teknik *purposive sampling*, informan tersebut dianggap paling tahu dan mengerti mengenai topik yang kita bahas, atau mereka memiliki peran sebagai penguasa sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian.

Peneliti memilih *purposive sampling* agar mempermudah untuk mencari dan mengumpulkan data yang valid dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang dianggap menguasai keahlian atau pekerjaan di bidangnya. Sehingga peneliti dapat mempermudah mengolah data di dalam penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT melalui e-Warong di Kota Surabaya. Berikut informan yang mengetahui tentang penyaluran BPNT melalui e-Warong di Surabaya :

1. Bapak Imam Mahmudi, selaku Kepala Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya.
2. Bapak Andreas Hanifah, selaku *staff* Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya.

3. Bapak Yanuar, selaku *staff* Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Kota Surabaya.

Selain Dinas Sosial Kota Surabaya, peneliti mengambil informan lain dari luar Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada awalnya peneliti menggunakan penelitian dengan teknik *purposive sampling*, kemudian berkembang menjadi teknik *snowball*. Hal tersebut digunakan untuk mencari informan lanjutan berdasarkan data yang diperoleh agar peneliti memperoleh data yang lengkap. Pihak Dinas Sosial Kota Surabaya menyarankan, memberi arahan, dan memberi petunjuk nama-nama pemilik e-Warong di Surabaya beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Berikut adalah nama informan pemilik e-Warong di Kota Surabaya :

1. Ibu Kartini selaku Ketua e-Warong Wetan Agung wilayah Surabaya Barat
2. Ibu Warsiatun selaku Ketua e-Warong Maju Jaya wilayah Surabaya Barat
3. Ibu Fe'suprihartini selaku Ketua e-Warong Tambah Rejo wilayah Surabaya Pusat
4. Ibu Rusidahwati selaku Ketua e-Warong Kebon Dalem wilayah Surabaya Pusat
5. Ibu Rohmatul Ula selaku Ketua e-Warong Jemur Harapan wilayah Surabaya Selatan
6. Ibu Sunarsih selaku Ketua e-Warong Ngagelrejo Sembada wilayah Surabaya Selatan
7. Ibu Maisyaroh selaku Ketua e-Warong Jaya Barokah 1 wilayah Surabaya Utara
8. Ibu Choiriyah selaku Ketua e-Warong Anugerah wilayah Surabaya Utara
9. Ibu Sulikatin selaku Ketua e-Warong Barokah Jaya wilayah Surabaya Timur
10. Ibu Yuni Kasiyati selaku Ketua e-Warong Barokah Jaya Sejahtera wilayah Surabaya Timur

Peneliti ingin melanjutkan wawancara kembali kepada KPM BPNT. Peneliti melakukan wawancara kepada KPM menggunakan teknik *snowball*

berdasarkan arahan dan petunjuk dari pemilik e-Warong. Berikut adalah nama informan KPM BPNT :

1. Ibu Asiyah selaku KPM BPNT
2. Ibu Indrayani selaku KPM BPNT
3. Ibu Supai selaku KPM BPNT
4. Ibu Khalimah selaku KPM BPNT
5. Ibu Soeparti selaku KPM BPNT
6. Ibu Sumayah selaku KPM BPNT
7. Ibu Khadijah selaku KPM BPNT
8. Ibu Misjamah selaku KPM BPNT
9. Ibu Jamiyah selaku KPM BPNT
10. Ibu Siswati selaku KPM BPNT

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Data menjadi elemen yang sangat penting dalam penelitian. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data terdapat empat jenis, yaitu :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara datang secara langsung dan menghadiri kegiatan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan interaksi kepada pihak informan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan tanya jawab oleh kedua pihak secara lisan dan bertatap muka dengan informan. Pendekatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara langsung untuk mendapatkan data lengkap dari informan. Wawancara secara mendalam dilakukan pada pihak yang terlibat dalam

program BPNT melalui e-Warong yaitu pihak Dinas Sosial Kota Surabaya, pemilik e-Warong, dan KPM BPNT.

3. Dokumentasi

Dokumen untuk mendapatkan informasi data dapat berasal dari jurnal, koran, makalah, gambar, karya tulis ilmiah, dan berita. Data dalam dokumen dapat berupa materi audio dan visual atau segala jenis bunyi. Setelah semua dokumen terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut. Pada penelitian ini, penulis mencatat dan mengumpulkan data berupa dokumen atau gambar dengan diperkuat oleh sumber-sumber lainnya yang relevan untuk dikaji dalam penelitian. Dokumen dalam penelitian kualitatif sangat berguna dalam penelitian untuk mendapat informasi terkait peristiwa yang terjadi dan sangat penting untuk mendukung penelitian kualitatif.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat empat alur teknik yaitu (Miles & Huberman, 1984) :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pengabstrakan, pemusatan perhatian, proses pemilihan, dan transformasi data kasar pada catatan tertulis di lapangan yang berbentuk analisis untuk mengarahkan, menjelaskan, dan mengorganisasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah beberapa sebuah data atau informasi yang disusun secara rapi dan digunakan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan.

3. Pengkodean atau Klasifikasi Data

Proses pengambilan data dokumen, teks, dan gambar, lalu dikumpulkan untuk membuat paragraf, kalimat, atau gambar ke dalam kategori-kategori.

4. Interpretasi Teoritik

Data dari hasil penelitian dapat dibandingkan dengan informasi literatur atau teori untuk dianalisis dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Matthew B Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana terdapat komponen analisis data, yaitu (Miles et al., 2014):

1. *Data Condensation*

Data Condensation berfokus pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, pemfokusan, dokumen, dan bahan empiris lainnya. *Data Condensation* meliputi penulisan ringkas, membuat kategori, dan analisis. *Data Condensation* memfokuskan dan membuang data yang tidak perlu agar dapat mengambil kesimpulan akhir.

2. *Data Display*

Data Display adalah kumpulan data dan informasi yang digunakan sebagai penarikan kesimpulan dan tindakan. *Data Display* disajikan dalam bentuk naratif. Ada beberapa jenis dalam penyajian data display yaitu grafik, matriks, bagan, dan jaringan.

3. *Drawing And Verifying Conclusion*

Drawing And Verifying Conclusion bertujuan untuk menarik kesimpulan dan verifikasi.

1.7.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik keabsahan data. Teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara melakukan perbandingan dengan pengecekan kembali data yang telah diperoleh. Patton menjelaskan bahwa teknik triangulasi data dapat dilakukan menggunakan perbandingan dan pengecekan informasi melalui waktu dan alat yang berbeda melalui (Lexy J Moleong, 2012):

1. Melakukan perbandingan data hasil pengamat dengan hasil wawancara;

2. Melakukan perbandingan mengenai ucapan seseorang di depan umum dan secara pribadi;
3. Melakukan perbandingan ucapan yang dikatakan mengenai kondisi penelitian dengan ucapan yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Melakukan perbandingan keadaan dengan pendapat masyarakat dan pejabat pemerintah;
5. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.